

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor informal di Indonesia mencakup berbagai kegiatan ekonomi berskala kecil yang melibatkan banyak pekerja. Sektor ini merupakan bagian penting dari ekonomi nasional karena menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar angkatan kerja yang tidak terorganisasi. Sektor informal mencakup berbagai jenis usaha seperti pedagang kaki lima, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, dan usaha rumah tangga seperti pembuat kue, pembuat tempe, dan pembuat barang anyaman. Menurut Widowati (2018), sektor informal adalah manifestasi dari pertumbuhan kesempatan kerja di negara berkembang, yang mencakup kegiatan ekonomi berskala kecil yang tidak terorganisasi.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2022, unit usaha di Indonesia masih didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 64,2 juta unit, dibandingkan dengan Usaha Besar (UB) sebanyak 55.000 unit. Pada tahun 2023, jumlah UMKM meningkat menjadi 65,43 juta unit, sementara UB meningkat menjadi 58.000 unit. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya, dari 5,71 juta unit pada tahun 2020, menjadi 5,89 juta unit pada tahun 2021, dan 6,08 juta unit pada tahun 2022 (Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, 2023).

Meski jumlah pekerja sektor informal terus meningkat, mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja sektor informal di Indonesia pada Agustus 2020 sebanyak 73,32 juta orang (57,36%), pada Agustus 2021 sebanyak 74,77 juta orang (57,42%), dan pada Agustus 2022 meningkat menjadi 76,23 juta orang (57,48%). Di Provinsi Jawa Timur, jumlah pekerja sektor informal juga meningkat selama tiga tahun terakhir: Agustus 2020 sebanyak 15,12 juta orang (57,81%), Agustus 2021

sebanyak 15,43 juta orang (58,12%), dan Agustus 2022 sebanyak 15,74 juta orang (58,43%) (BPS, 2020, 2021, 2022).

Pekerja sektor informal seringkali tidak terlindungi dan minim informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Menurut Priyandi (2017), kelompok ini adalah yang paling tidak terlindungi serta kurang memahami pentingnya pencegahan kecelakaan dalam bekerja. Kurangnya pengetahuan dan edukasi tentang K3 di kalangan pekerja sektor informal menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 173.105 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, dengan 58.872 di antaranya disebabkan oleh penyakit akibat kerja.

Menurut perkiraan terbaru dari International Labour Organization (ILO, 2020), sebanyak 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun di seluruh dunia karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sebanyak 2,3 juta (85%) dari kematian ini disebabkan oleh penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 399.000 (15%) disebabkan oleh kecelakaan kerja. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 sangat penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko di tempat kerja.

Di Indonesia, pelaksanaan K3 merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku industri. Tujuan utama penerapan K3 adalah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap norma K3, meningkatkan partisipasi semua pihak dalam optimalisasi pelaksanaan budaya K3, serta mewujudkan budaya K3 di setiap kegiatan usaha. Namun, kenyataannya, banyak kecelakaan kerja yang terjadi akibat kurangnya kepedulian terhadap keselamatan dan minimnya edukasi K3.

Kesadaran akan pentingnya K3 tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga masyarakat dan lingkungan dari potensi bahaya di tempat kerja (Hasim, 2021). Setiap tempat kerja memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan penyakit dan kecelakaan pada pekerja. Selain bahaya di tempat kerja, masalah

kesehatan umum seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, masalah gizi, gangguan kesehatan reproduksi, dan kesehatan lingkungan yang kurang memadai juga menjadi tantangan bagi pekerja sektor informal (WHO, 2017).

Pekerja sektor informal seringkali belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan masalah kesehatan yang mereka hadapi. Selama ini, pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat umum dan tidak dikaitkan dengan faktor risiko di tempat kerja. Selain itu, waktu pelayanan di Puskesmas seringkali bersamaan dengan waktu kerja, sehingga sulit bagi pekerja sektor informal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Untuk mendekatkan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Pos UKK merupakan wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat pekerja. Pos UKK memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, serta kuratif dan rehabilitatif sederhana.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2014, terdapat 1.034 Puskesmas di Indonesia yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya, menjadi 2.205 Puskesmas pada tahun 2015, 3.475 Puskesmas pada tahun 2016, dan 6.110 Puskesmas pada tahun 2017. Keseluruhan Puskesmas di Indonesia berjumlah 9.655 Puskesmas (Kementerian Kesehatan, 2023a).

Di Provinsi Jawa Timur, capaian program kesehatan kerja sampai Desember 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 520 dari 678 Puskesmas telah melaksanakan upaya kesehatan kerja. Ada 12 kabupaten/kota yang telah mencapai 100% dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja, termasuk Kabupaten Tulungagung (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018).

Di Kabupaten Tulungagung, Puskesmas Pucung di Kecamatan Ngantru menjadi salah satu Puskesmas yang telah menerapkan upaya kesehatan kerja. Kecamatan Ngantru memiliki perkembangan industri yang cukup pesat, termasuk industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga (Abdillah & Azam, 2016). Puskesmas Pucung memiliki 2 Pos UKK yang melayani pekerja sektor informal seperti pengrajin anyaman bambu dan petani.

Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mencatat jumlah kasus penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di wilayah kerja Puskesmas Pucung. Pada tahun 2020, terdapat 27 kasus penyakit akibat kerja dan 54 kasus kecelakaan kerja. Jumlah kasus penyakit akibat kerja meningkat menjadi 38 kasus pada tahun 2022, sementara jumlah kecelakaan kerja menurun menjadi 82 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan K3, masih terdapat tantangan yang harus diatasi.

Mengingat pentingnya upaya kesehatan kerja bagi pekerja sektor informal, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan program UKK pada sektor informal di wilayah kerja Puskesmas Pucung. Penelitian ini akan membandingkan kondisi lapangan dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi pemerintah dan buku panduan K3, untuk mengidentifikasi masalah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Dengan mengkaji tren peningkatan jumlah pekerja sektor informal, tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan K3 melalui Pos UKK, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja sektor informal di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka diajukan fokus penelitian ini, yaitu :

1. Mengeskplorasi peran Kader Pos UKK pada pekerja sektor informal di wilayah kerja Puskesmas Pucung Kabupaten Tulungagung?
2. Mengeskplorasi kesiapan sektor informal pada UKK di wilayah kerja Puskesmas Pucung Kabupaten Tulungagung?
3. Mengeskplorasi kendala yang dihadapi oleh pekerja informal dalam penerapan program UKK?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman Kader Pos UKK dan pekerja sektor informal terhadap Program UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Pucung Kabupaten Tulungagung, sehingga meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja sektor informal.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengeskplorasi peran Kader Pos UKK pada pekerja sektor informal di wilayah kerja Puskesmas Pucung Kabupaten Tulungagung
- b. Mengeskplorasi kesiapan sektor informal pada UKK di wilayah kerja Puskesmas Pucung Kabupaten Tulungagung.
- c. Mengeskplorasi kendala yang dihadapi oleh pekerja informal dalam penerapan program UKK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam wacana pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, memberikan pengetahuan yang didasarkan pada kebenaran ilmiah, Serta menyediakan dasar penelitian lebih lanjut terkait evaluasi penerapan Program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) pada sektor informal di wilayah kerja Puskesmas Pucung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian ilmiah, khususnya terkait dengan evaluasi penerapan Program UKK pada sektor informal.

b. Bagi Profesi Kesehatan

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi petugas kesehatan, terutama yang terlibat dalam pelaksanaan Program UKK di puskesmas, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan kerja.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengembangkan konsep dan ilmu kesehatan, khususnya terkait evaluasi Program UKK pada sektor informal, di lingkungan institusi pendidikan.

d. Bagi Tempat Penelitian

Menyediakan masukan dan pengetahuan tambahan bagi petugas kesehatan di Puskesmas Pucung terkait dengan evaluasi penerapan Program UKK, Serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran petugas kesehatan mengenai kebutuhan kesehatan dan keselamatan pekerja sektor informal di wilayah kerja Puskesmas Pucung.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dan waktu penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian dengan judul yang sama belum pernah dilakukan di Kabupaten Tulungagung.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2024.

No	Peneliti	Judul	Rancangan Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(Candra, W. W., 2020)	Analisis Pelaksanaan Program Pos Upaya Kesehatan Kerja di Tempat Pelelangan Ikan Tumumpa di Wilayah Kerja Puskesmas Tuminting Kota Manado	Penelitian Kualitatif (In-depth, Interview, dan Observasi)	Pelaksanaan Program Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Program Pos Upaya Kesehatan Kerja di Tempat Pelelangan Ikan Tumumpa di Wilayah Kerja Puskesmas Tuminting belum berjalan dengan baik.	Fokus pada pelaksanaan program UKK di tempat pelelangan ikan Tumumpa. Menilai apakah program UKK berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian kualitatif dengan pendekatan in-depth interview dan observasi.
2	(Subariyah, R., 2020)	Implementasi Program Pos Upaya Kesehatan Kerja di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Tahun	Penelitian Kualitatif (Studi Deskriptif dengan Teknik Indepth Interview, Observasi, dan Telaah Dokumen)	Implementasi Program Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Puskesmas Perlu Melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Rutin Terhadap Pelaksanaan Kegiatan pada Pos UKK, Pelatihan bagi	Fokus pada implementasi program UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk. Menilai bagaimana program UKK dilaksanakan dan

		2020		Petugas Kesehatan dan Kader, Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.	merekomendasikan solusi untuk meningkatkan implementasinya.
3	(Mulyanto, L. et al., 2021)	Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Kerja pada Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau	Penelitian kualitatif (indepth interview)	Pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang	Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Kerja pada Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Bugis khususnya program promosi dan preventif kesehatan kerja belum dapat dilaksanakan dengan baik, namun untuk upaya kuratif dapat dilaksanakan oleh kader Pos UKK.
4	(Wulandari, D. & Sari, R. P., 2019)	Pengaruh Pelatihan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) terhadap Pengetahuan dan Keterampilan	Penelitian Kuantitatif Quasi Eksperimental.	Variabel Independen: Pelatihan UKK. Variabel Dependen: Pengetahuan dan Keterampilan	Pelatihan UKK berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan dalam pelaksanaan UKK.
					Fokus pada pelaksanaan program UKK, khususnya program promosi dan preventif. Menilai bagaimana program UKK dilaksanakan dan mengapa program promosi dan preventif belum dapat dilaksanakan dengan baik.
					Fokus pada pengaruh pelatihan UKK terhadap pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan.

		Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Wonosari Kabupaten Gunungkidul.	Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan UKK.		Penelitian kuantitatif quasi eksperimental.
5	(Lestari, D. A. & Rahmawati, E., 2018)	Evaluasi Program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Kecamatan Medan Timur Tahun 2017.	Penelitian Kuantitatif Deskriptif.	Variabel Independen: Program UKK. Variabel Dependen: Pengetahuan dan Sikap Petugas Kesehatan tentang UKK.	Pengetahuan dan sikap petugas kesehatan tentang UKK masih kurang. Perlu adanya peningkatan program UKK di Puskesmas Kecamatan Medan Timur. Fokus pada evaluasi program UKK di Puskesmas Kecamatan Medan Timur. Mengukur pengetahuan dan sikap petugas kesehatan tentang UKK. Penelitian kuantitatif deskriptif.